

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta terhadap pengendalian persediaan material *fast moving* masih bersifat administratif, yaitu berdasarkan rasio 0,15–1,5 dari stok standar di tingkat UID/UP3 serta ambang batas informal 50 unit per ULP, dan belum sepenuhnya memperhitungkan variasi pemakaian aktual maupun akumulasi *lead time* pengadaan secara statistik.
2. Penggunaan metode *Economic Order Quantity* (EOQ), *safety stock*, dan *reorder point* (ROP) pada material kWh meter prabayar E-PR dan MCB 1P 4A menghasilkan kuantitas pemesanan ekonomis sebesar 6.707 unit untuk kWh meter E-PR dan 14.635 unit untuk MCB 1P 4A, stok pengaman sebesar 18.381 unit untuk kWh meter E-PR dan 8.693 unit untuk MCB 1P 4A, serta titik pemesanan kembali sebesar 39.049 unit untuk kWh meter E-PR dan 21.148 unit untuk MCB 1P 4A.
3. Penerapan metode EOQ pada kedua material tersebut mampu memberikan gambaran kebijakan persediaan yang lebih terukur dan berbasis data dibandingkan pendekatan ambang batas administratif yang selama ini diterapkan PT PLN UID Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, meskipun penerapannya di lapangan tetap perlu disesuaikan dengan batasan *lead time* pengadaan aktual dan konteks operasional perusahaan sebagai penyedia layanan kelistrikan negara.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran:

1. Peneliti menyarankan agar PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta menjadikan hasil perhitungan EOQ, *safety stock*, dan *reorder point* pada penelitian ini sebagai bahan evaluasi kuantitatif terhadap kebijakan ambang batas stok yang berjalan saat ini, khususnya untuk material kWh meter prabayar E-PR dan MCB 1P 4A.
2. Peneliti menyarankan agar PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta melakukan pemutakhiran data kebutuhan, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan *lead time* secara berkala, sehingga perhitungan EOQ, *safety stock*, dan *reorder point* tetap relevan dengan kondisi pemakaian material yang sesungguhnya.
3. Peneliti menyarankan agar PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mengadopsi rancangan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengendalian persediaan material *fast moving* yang dihasilkan dari penelitian ini sebagai prosedur baku, disertai sosialisasi kepada bagian logistik, gudang, dan pengadaan agar penerapan EOQ, *safety stock*, dan *reorder point* dapat berjalan secara konsisten serta terdokumentasi dalam operasional sehari-hari.